**PERAN DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG DALAM PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**Oleh**

**Ati Yuniati dan Achmad Jamaludin**

Penyandang disabilitas tuna netra membutuhkan pelayanan dan pemenuhan hak- hak nya dari Pemerintah karena merupakan kewajiban pemerintah yang diatur dalam Pasal 28H - Pasal 28J, UUD 1945. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 menjelaskan mengenai standar rehabilitasi dan pemberian pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas untuk mengatur mengenai pemberian pelayanan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas. Banyaknya penyandang disabilitas tuna netra yang belum mampu melakasanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan dan bermasyarakat dengan baik menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peran Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam upaya memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas tuna netra?, (2) Apa sajakah faktor penghambat yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam upaya memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas tuna netra?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Peran Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak terhadap penyandang disabilitas tuna netra adalah dengan memberikan program melalui bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan, (2) Faktor penghambat Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tuna netra yaitu penyandang disabilitas tuna netra mempunyai kemampuan berbeda dalam menangkap materi yang diberikan sehingga menyulitkan dalam proses rehabilitasi dan kurangnya sarana prasarana bagi penyandang disabilitas tuna netra.

# Kata Kunci: Peran, Pelayanan dan Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas.